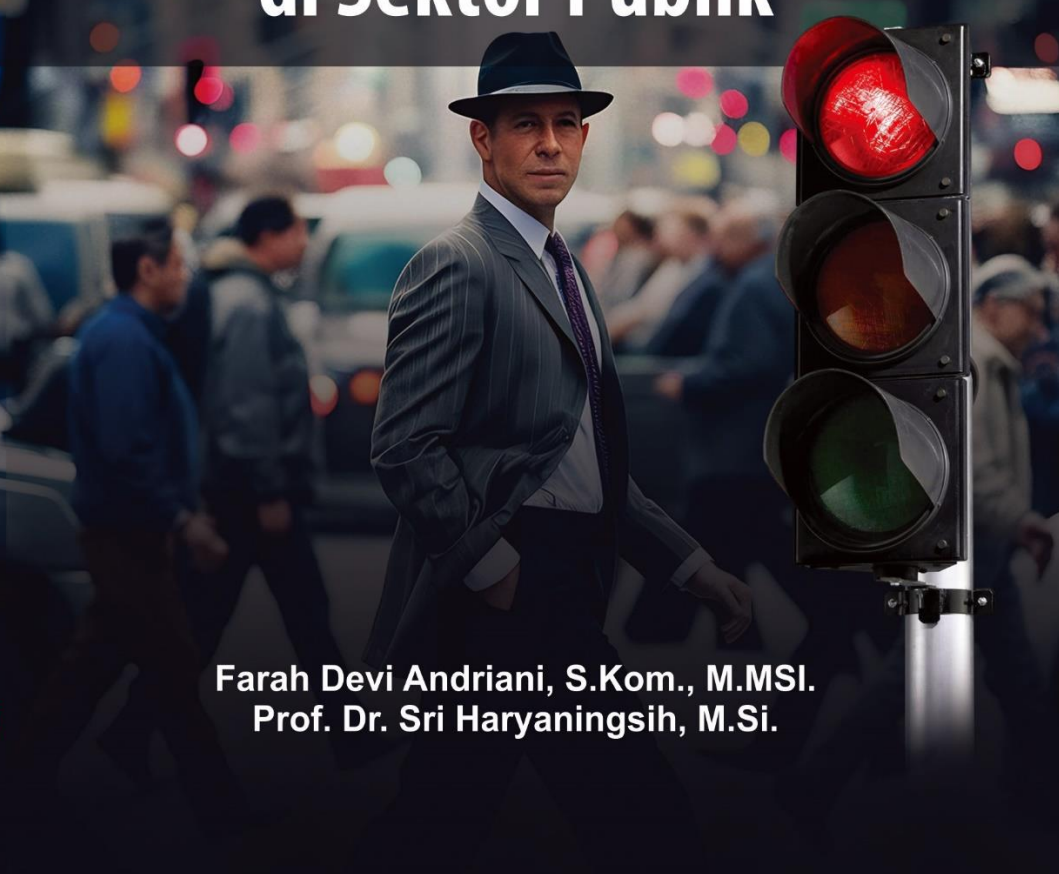


Information Technology

BalanCed Scorecard

di Sektor Publik



Farah Devi Andriani, S.Kom., M.MSI.
Prof. Dr. Sri Haryaningsih, M.Si.

INFORMATION TECHNOLOGY BALANCED SCORECARD

DI SEKTOR PUBLIK

Penulis:

Farah Devi Andriani, S.Kom., M.MSI.

Prof. Dr. Sri Haryaningsih, M.Si.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

INFORMATION TECHNOLOGY BALANCED SCORECARD DI SEKTOR PUBLIK

Copyright @2025 By Farah Devi Andriani, S.Kom., M.MSI.

Prof. Dr. Sri Haryaningsih, M. Si.

All right reserved

Penulis

Farah Devi Andriani, S.Kom., M.MSI.

Prof. Dr. Sri Haryaningsih, M. Si.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

AtikaNS

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-670-0

Cetakan ke-1, Juli 2025

14 x 21 cm, vi + 64 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

EC002025099793, 28 Juli 2025

Pencipta

Nama

Farah Devi Andriani, S. Kom., M.MSI, dan Prof. Dr. Sri Haryaningih, M. Si.

Alamat

Jln Silat Baru K 5 Komplek Untan Pontianak, Bausit Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78124

Kewarganegaraan

Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama

Farah Devi Andriani, S. Kom., M.MSI, dan Prof. Dr. Sri Haryaningih, M. Si.

Alamat

Jln Silat Baru K 5 Komplek Untan Pontianak, Bausit Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78124

Kewarganegaraan

Indonesia

Jenis Ciptaan

Buku

Judul Ciptaan

INFORMATION TECHNOLOGY BALANCED SCORECARD DI SEKTOR PUBLIK

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

28 Juli 2025, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan

000940054

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



u.b. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah diunggah secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan meminda kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR

Perkembangan teknologi di dunia saat ini sudah berkembang secara pesat. Seperti yang kita ketahui seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mengalami transisi dari era konvensional ke era digital. Perkembangan dunia digital telah memberikan perubahan pada aktivitas dan kebiasaan masyarakat. Kemudahan bertransaksi, jarak dan waktu tidak menjadi hambatan serta tidak mempunyai keterbatasan, dalam dampak yang dirasakan pada era digital. Dunia digital merupakan hal yang sangat penting, sebab dengan digitalisasi akan memungkinkan mendapatkan informasi, mempercepat komunikasi, dapat membuka peluang ekonomi baru, serta dapat mendorong inovasi dari berbagai sektor, misalnya dalam pendidikan, kesehatan, juga dalam pemerintahan.

Pemerintah Indonesia dalam melakukan pelayanan berlalulintas pada masyarakat juga menggunakan perubahan/ inovasi yaitu dengan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi membantu dalam penegakan hukum, edukasi, dan pelayanan publik melalui aplikasi dan platform digital. Tujuan utama kepolisian melakukan penindakan masyarakat dengan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. ETLE juga bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih

efisien dan transparan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan pungutan liar. Disamping itu tujuan utama ETLE adalah meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, membantu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan, meningkatkan disiplin berkendara sehingga dengan adanya ELTE masyarakat menjadi lebih sadar dan disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Dengan ELTE Kepolisian dapat menegakkan hukum secara efisien dan transparan memungkinkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan pungutan liar, akan terciptakan sistem data yang *terrecord* sehingga dengan ETLE menghasilkan data pelanggaran lalu lintas yang dapat digunakan untuk analisis dan pengembangan kebijakan lalu lintas, dan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan serta dapat mencegah oknum polisi melakukan pemerasan pada pelanggar pada saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Bagi Kepolisian akan meningkatkan kinerja kepolisian serta dapat pencitraan yang berubah terhadap kepolisian yang akan lebih baik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

BAB 1

PENDAHULUAN	1
1.1. Pendahuluan	2
1.2. Kenapa Harus Menggunakan Digitalisasi?	3
1.3. Peran Transformasi Digital di Ditlantas Polri	6
1.4. Apa itu Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Balanced Scorecard	6

BAB 2

KONSEP DASAR TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ORGANISASI PUBLIK	9
2.1. Pengertian dan Prinsip Dasar Transformasi Digital ----	10
2.2. Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kinerja Organisasi Publik	13
2.3. Tren Global dalam Digitalisasi Sektor Publik	14
2.4. Pemanfaatan Digitalisasi di Berbagai Bidang	14
2.5. Tantangan dan Peluang Digitalisasi dalam Organisasi Publik	15
2.6. Beberapa Alasan Mengapa E-Government Menjadi Penting dalam Studi Manajemen di Era 5.0	16

BAB 3

ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI DITLANTAS POLRI	21
3.1. Pengertian dan Tujuan ETLE	22
3.2. Tahapan Implementasi ETLE di Ditlantas Polri	23

3.3. Keunggulan dan Manfaat ETLE bagi Ditlantas Polri----	24
3.4. Kendala ETLE di Ditlantas Polri -----	25
3.5. Dampak ETLE terhadap Kinerja Ditlantas Polri -----	25

BAB 4

PENERAPAN BALANCED SCORECARD (BSC) DALAM MENGUKUR KINERJA DITLANTAS POLRI -----	27
4.1. Pengertian dan Konsep Balanced Scorecard-----	28
4.2. Alasan Menggunakan BSC untuk Mengukur Kinerja Ditlantas Polri -----	29
4.3. Fokus pada Inovasi dan Pembelajaran: -----	30
4.4. Perspektif Keuangan dalam BSC Ditlantas Polri -----	30
4.5. Perspektif Pelanggan dalam BSC Ditlantas Polri-----	31
4.6. Perspektif Proses Internal dalam BSC Ditlantas Polri-----	32
4.7. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan dalam BSC Ditlantas Polri -----	33

BAB 5

KINERJA DITLANTAS POLRI MELALUI ETLE DAN BALANCED SCORECARD -----	35
5.1. Pengaruh ETLE terhadap Kinerja Ditlantas Polri -----	36
5.2. Balanced Scorecard dalam Mengukur Kinerja Ditlantas Polri-----	39
5.3. Dampak Penerapan ETLE terhadap Kepatuhan Pengendara Lalu Lintas -----	40
5.4. Evaluasi terhadap Pemeliharaan dan Keberlanjutan Sistem ETLE-----	41

BAB 6

TANTANGAN & PELUANG DALAM TRANSFORMASI DIGITAL DITLANTAS POLRI MELALUI ETLE-----	43
6.1. Tantangan dalam Penerapan ETLE di Ditlantas Polri-----	44
6.2. Peluang dalam Transformasi Digital Ditlantas Polri melalui ETLE -----	45

6.3. Strategi Menghadapi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang -----	48
---	----

BAB 7

EVALUASI DAN IMPLIKASI PENERAPAN ETLE DI DITLANTAS POLRI -----	51
7.1. Evaluasi Kinerja ETLE di Ditlantas Polri-----	52
7.2. Implikasi Penerapan ETLE terhadap Kinerja Ditlantas Polri-----	53
7.3. Dampak Jangka Panjang dari Penerapan ETLE -----	55
DAFTAR PUSTAKA -----	57
PROFIL PENULIS-----	63

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Almatrodi, I., & Skoumpopoulou, D. (2023). *Organizational Routines and Digital Transformation: An Analysis of How Organizational Routines Impact Digital Transformation Transition in a Saudi University*. MDPI Systems, 239.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Belyakova, O. (2021). *Digital Transformation Of Public Administration: Achievements And Problems. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences: Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development 2020 (pp. 2357-1330)*. Samara: Published by European Publisher.
- Borouan, E., Manafi, M., & Hooman, A. (2011). *Balanced Scorecard; a Tool for Measuring and Modifying IT Governance in Healthcare Organizations. International Journal of Innovation, Management and Technology*, 141 -146.
- Chege, S. M., Wang, D., & Suntur, S. L. (2019). *Impact of information technology innovation on firm performance in Kenya. Taylor Francis Journal*, 1-30.
- Djajoesman. (1976). *Polisi dan lalu lintas*. Bina Aksara.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.

- Fitriyani, D. (2014). *Balance Scorecard: ALternatif Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik*. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 16-31.
- Forrester. (2021). *Predictions 2021: Technology diversity and a new digital divide will disrupt the next decade*. Forrester.
- Gun, L., Imamoglu, S. Z., Turkcan, H., & Ince, H. (2024). *Effect of Digital Transformation on Firm Performance in the Uncertain Environment: Transformational Leadership and Employee Self-Efficacy as Antecedents of Digital Transformation*. *MDPI Sustainability*, 1200.
- Haryani, L., & Hidayah, I. (2014). *It Balanced Scorecard Dan Implementasinya Dalam Penyelarasan Ti Dengan Strategi Bisnis*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia (pp. 2.08-8 - 2.08.12). Yogyakarta: STMIK AMIKOM Yogyakarta.
- Hidayatullah, S., Prasetya, D. A., Purnomo, D. A., & Rachmawati, I. K. (2022). *HOT FIT Model Pengembangan Sistem Informasi*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Gava Media.
- Islami, I. (2000). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Johnson, J. L., Adkins, D., & Chauvin, S. (2020). *A Review of the Quality Indicators of Rigor in Qualitative Research*. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 138 - 146.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard—Measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71–79.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jakarta: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Khan, U., Zhang, Y., & Salik, M. (2020). *The Impact of Information Technology on Organizational Performance: The Mediating Effect of Organizational Learning*. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 987–998.
- Laudon, K., & Laudon, J. (2014). *Management Information System : Managing the Digital Firm*. England: Pearson.
- Lopez, C. P., Usuga, L. R., Torres, C. C., Sayadi, S., & Klerkx, L. (2021). *Digital transformation of the agrifood system: Quantifying the conditioning factors to inform policy planning in the olive sector*. Land Use Policy.
- Mahmud, M. F., Soekirman, A., & Tesniwati, R. (2022). *Penguatan Kinerja Melalui Transformasi Digital, Budaya Adaptif, Tranfer Pengetahuan dan Pola Kerja Pada Bea Cukai Indonesia*. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, 323-342.
- Marcos, A. F., Rouyet, J. I., & Bosch, A. (2012). *An IT Balance Scorecard Design under Service Management Philosophy*. Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 4972-4981). Hawaii: IEEE Computer Society.
- McKinsey. (2022, August 1). *What is innovation?* McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation/what-is-innovation>

- Moleong, L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mundzirin, A. (2024, Januari 14). *Kapolresta Pontianak Akan Aktifkan Kembali KTL di Pontianak*. Pontianak, Polri, Indonesia.
- Nawawi, I. (2009). *Public policy: Analisis, strategi advokasi teori dan praktek*. PMN.
- Niven, P. R. (2006). *Balanced scorecard step-by-step: Maximizing performance and maintaining results* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Nugroho, R. D. (2002). *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang*. Elex Media Komputindo. (Catatan: Penerbit ditambahkan berdasarkan informasi umum, harap verifikasi jika perlu).
- Nunzio, C., Giulia, F., Stefano, A., & Luca, G. (2021). *A systems approach to the Digital Transformation of Public Administration*. *Prospettive in Organizzazione*, 1-20.
- Parsons, W. (2001). *Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan* (T. B. Santoso, Trans.). Kencana.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy change and learning: An advocacy coalition approach*. Westview Press.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Subarsono. (2013). *Analisis kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2008). *Analisis kebijakan publik*. Alfabeta.
- Wahab, A., & Solichin. (2016). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

- Waluyo, A. (1992). *Implementasi kebijakan kekuasaan kehakiman Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta:PTelexMediaKomputindo.
- Westerman, G., Tannou, M., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2012). *The digital advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry*. Capgemini Consulting; MIT Sloan Management. https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/07/The_Digital_Advantage__How_Digital_Leaders_Outperform_their_Peers_in_Every_Industry.pdf
- Widodo, J. (2007). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Buku Seru.
- Winarno, E. (2017). Kompleksitas proses kebijakan sosial. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 1–14.

PROFIL PENULIS



Farah Devi Andriani S.Kom. M.MSI adalah lahir di Pontianak pada tgl 30 Desember 1991. Menyelesaikan studi S1 dan S2 pada universitas yang sama yaitu di Bina Nusantara di Jakarta pada Program Manajemen Sistem Informasi pada tahun 2017. Beliau adalah

sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada jurusan Ilmu Administrasi program studi Administrasi Publik di Universitas Tanjungpura. Beliau banyak tulisan maupun penelitian yang berbasis e- Government , diantaranya jurnal Scopus yang telah diterbitkan berjudul

The user Acceptance Factors of E-Felling System In Pontianak. Juga menulis buku berjudul Analysis of The Success of Sipemuda Online E- Government, Best Practice implementasi E- Gaverment.



Prof Dr Sri Haryaningsih M.Si Lahir dikota Magelang pada tgl 10 September 1957. beliau adalah lulus S1 dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Tanjungpura. Dan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di jurusan Adminstrasi Negara di Universitas Gajah Mada dan S3 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran Bandung. penulis adalah dosen di Fakultas FISIP

Universitas Tanjungpura Pontianak Spesialisasi di Bidang kajian Kebijakan Publik. Dan beliau aktif mengikuti kajian kajian dan seminar Nasional maupin international pada isu kebijakan juga sebagai nara sumber baik nasional maupin internationak